

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Joko Prastowo Raharjo¹, Endah Vestikowati², Neti Sunarti³

Universitas Galuh Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: joko.prastowo84@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”. Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu: Terdapat program pemberdayaan masyarakat yang sudah ditargetkan akan tetapi belum terealisasi; Kurangnya progres dalam pengurangan jumlah penduduk miskin; Kurangnya program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buniseuri untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Sehingga tujuan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum dilaksanakan dengan optimal berdasarkan aspek-aspek strategi pemberdayaan.

Kata Kunci: Strategi pemberdayaan masyarakat, UMKM

PENDAHULUAN

Untuk menanggulangi perekonomian masyarakat Indonesia yang cenderung menengah ke bawah, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat bisa lebih mandiri untuk

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Program pemberdayaan banyak diarahkan pada masyarakat desa atas dasar pertimbangan beberapa permasalahan yang dihadapi, baik menyangkut masalah pengetahuan, keterampilan, fasilitas maupun kemampuan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di berbagai

desa di Indonesia, tidak terkecuali di Desa Buniseuri.

Pemerintahan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi perekonomian masyarakatnya, akan tetapi tidak semua program yang telah direncanakan sebelumnya dapat terealisasi sepenuhnya. Berdasarkan tabel data penduduk miskin di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 jumlah penduduk miskin di Desa Buniseuri dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buniseuri belum menunjukkan hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis, ada beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat program pemberdayaan masyarakat yang sudah ditargetkan akan tetapi belum terealisasi, seperti pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ditargetkan dibentuk lima buah UKM karena sesuai dengan jumlah Dusun, akan tetapi hanya ada empat buah UKM yang terbentuk.
2. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi seperti pembentukan UKM yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk

miskin di Desa Buniseuri dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan.

3. Kurangnya program yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Buniseuri untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Hal ini terlihat Pemerintah Desa Buniseuri hanya melakukan program UKM saja dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? .

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Nawawi (2012:147) “Strategi merupakan sebah kiat, cara dan taktik utama yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah dan dibuat oleh manajemen puncak agar tercapainya tujuan organisasi”.

Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebianto (2017: 26) mengemukakan bahwa: “Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowement) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang

bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan”.

Adapun definisi pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses bertahap yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat agar dapat memiliki keterampilan fungsional yang dapat digunakan sebagai daya saing dalam dunia pekerjaan dan dapat menjadikan masyarakat yang mandiri Wibowo dan Mulyono (2014: 54).

Mardikanto dan Soebianto (2017: 170) ada lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Motivasi
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
3. Manajemen diri
4. Mobilisasi sumberdaya
5. Pembangunan dan pengembangan jejaring.

Menurut Jualianalimin (2020) dijelaskan bahwa ada lima program pemberdayaan masyarakat desa, yaitu:

1. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yakni UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan BUMDEs (Badan Usaha Milik Desa) .
2. Program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.
3. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
4. Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan
5. Program pemberdayaan masyarakat di bidang agama Pada penelitian

ini yang menjadi fokus utama yaitu program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yaitu tepatnya UMKM.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014:8) menyatakan bahwa: Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 s.d Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

METODE

Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer berperan sebagai penunjang bagi data pokok yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, data dari Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabuapten Ciamis, dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan data sekunder digunakan oleh peneliti rencananya yaitu buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan kajian penelitian dan menggunakan arsip mengenai pemberdayaan yang telah dilakukan di

Desa Buniseuri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sedangkan teknik pengolahan datanya meliputi: Data reduction (reduksi data); Data display (penyajian data); Conclusion drawing (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi

a. **Adanya dorongan untuk membentuk kelompok untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat**

Pemerintah Desa telah melakukan tindakan dalam memotivasi masyarakat dan lingkungannya untuk terlibat langsung dan aktif dalam program pembentukan kelompok UMKM di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, memotivasi masyarakat dilakukan melalui kunjungan-kunjungan langsung kepada setiap masyarakat desa sebagai upaya mengarahkan, mendorong dan meningkatkan pemahaman terkait program pembentukan kelompok UMKM ini. Sementara itu mengenai hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh

keterangan bahwa masih kurang pemahaman, kesadaran serta adanya rasa ketidakpedulian dari masyarakat. Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah membuat program-program kerjasama antara pelaku riset, koperasi, LPM dan UMKM terkait Program-program pembentukan kelompok UMKM ini.

b. **Adanya motivasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat agar bisa mengikuti program-program tentang pemberdayaan masyarakat**

Pemerintah Desa telah melakukan tindakan dalam memotivasi masyarakat dan lingkungannya untuk terlibat langsung dan aktif dalam program-program UMKM di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, memotivasi masyarakat dilakukan melalui bimbingan dan arahan ditambah pendataan terhadap para pelaku UMKM tetapi belum optimal dikarenakan masih ada masyarakat yang belum merasakan dorongan yang langsung dari Pemerintah Desa.

Sementara itu mengenai hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa Masyarakat Desa masih kurang aktif dalam mengikuti program pemberdayaan, karena Program Pemberdayaan UMKM tergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh adanya peluang bagi peran aktif masyarakat dan

dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah memudahkan dalam pengajuan modal kepada Pemerintah Daerah. Maka dari itu Pemerintah melakukan pendataan kepada Masyarakat desa yang akan memulai UMKM dan telah melaksanakan UMKM sehingga masyarakat bisa terdorong untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat.

2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

a. Adanya pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan agar masyarakat bisa menciptakan mata pencaharian sendiri

Pemerintah Desa telah melakukan tindakan berupa Pelatihan Kewirausahaan dan pelatihan tentang pemasaran dengan menggunakan teknologi digital, pengenalan e-commerce yang bekerjasama dengan PT.Indomart walaupun sebagian masyarakat sendiri kurang mengetahui pelatihan tersebut. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa disini Masyarakat Desa sendiri belum secara sadar tergerak dalam mengikuti pelatihan kewirausahaan. Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa 7 dalam mengatasi hambatan tersebut adalah Pemerintah

Desa membuat rembuk warga minimal dua bulan satu kali yang tujuannya untuk memberikan wadah menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ ide yang dapat mempermudah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam merencanakan dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat Desa itu sendiri.

b. Adanya program yang dapat meningkatkan keahlian masyarakat untuk mencari pekerjaan. Pemerintah Desa mengadakan program yang dapat meningkatkan keahlian masyarakat untuk mencari pekerjaan

Menurut informasi yang diperoleh bahwa Pemerintah sudah merealisasikan program pelatihan kewirausahaan, dan untuk program yang belum terealisasi adalah (UMKM) hanya menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja, dari 99% dari total lapangan kerja dan memberikan pemahaman teknologi informasi dengan mengenalkan akses internet sebagai bahan referensi untuk melihat dan menjadikan perbandingan terhadap hasil produksi. Mengenai hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa masyarakat masih memiliki aspek tanggung jawab yang kurang dalam kinerjanya untuk melaksanakan program pemberdayaan UMKM.

Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah pemerintah sudah memberikan arahan terhadap perangkat Desa agar dapat mempelajari dan memahami UMKM dengan mudah agar dapat mengetahui berbagai jenis aspek UMKM misalkan dalam pemasaran UMKM lewat pelatihan kewirausahaan saat ini sehingga dapat menata pelaku usaha mikro dalam memasarkan produk usahanya.

3. Manajemen Diri

a. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin mereka sendiri yang mengatur kegiatan mereka terkait dengan program pemberdayaan masyarakat

Pemerintah Desa memberikan pengarahan berupa bentuk pengadaan program-program kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa seperti bazaar, dll. Sehingga secara tidak langsung para pelaku usaha mikro dapat memimpin usaha mereka sendiri dengan terbiasa. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa dalam aplikasinya kelompok UMKM ini masih belum dapat berjalan dengan sendiri perlu dilakukan pendampingan.

Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan adanya program pelatihan kewirausahaan diharapkan Masyarakat Desa khususnya Pelaku Usaha Mikro dapat meningkatkan keterampilan

dengan mandiri dimana dalam kepemimpinan usahanya dilakukan sendiri jadi selaku pelaku usaha mikro sendiri lebih mengetahui dan menjaga kualitas hasil produknya.

b. Adanya pendampingan dari pemerintahan desa sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya. Adanya pendampingan dari Pemerintahan Desa sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya

Pemerintah Desa mendampingi Masyarakat Desa dalam perihal administrasi, pembentukan kelompok, konsultasi pengelolaan UMKM dan pengajuan sumber dana modal dan sebagai tambahan Pemerintah Desa telah mengadakan Fasilitator yang ahli dibidangnya agar dapat mendampingi kelompok UMKM. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa program pemberdayaan kelompok UMKM ini dalam proses produksi memerlukan ahli dalam prosesnya.

Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan fasilitator yang akan mendampingi kelompok UMKM melakukan pelatihan untuk cara proses produksi yang berkualitas, pengadaan bahan, proses produksi, kemasan dll agar dapat lebih terarah dan terkonsep secara jelas sehingga dapat

mengembangkan usahanya secara optimal.

c. Adanya pemberian wewenang yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok pemberdayaan untuk mengatur dan mengelola kelompok tersebut

Adanya pemberian wewenang yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok pemberdayaan untuk mengatur dan mengelola kelompok tersebut Pemerintah Desa memberikan kewenangan kepada Kelompok UMKM untuk membuat kelompok usahanya sesuai dengan bidang yang mereka pilih. Bantuan kewenangan dari Pemerintah Desa adalah dengan diberikan kemudahan perizinan kelompok UMKM.

4. Mobilisasi Sumber Daya

a. Adanya penghimpunan sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial

Adanya penghimpunan sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal social Pemerintah Desa mengupayakan dengan memudahkan pinjaman modal dengan bunga rendah dan Pemerintah Desa sedang mengajukan pengajuan Pemodalan UMKM tahun 2020- 2021 yang telah diselenggarakan oleh negara agar setiap masyarakat yang mendapatkan pemodalan tersebut sehingga sudah ada bentuk

penghimpun sumber sumber dana untuk menciptakan modal sosial.

Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa 10 pemerintah Desa belum bisa membantu dalam segi pemodalan secara langsung melalui sumbangan sukarela ataupun tabungan reguler. Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah Pemerintah Desa sedang melakukan kerjasama dengan Dinas Kooperasi bisa diberikan pemodalan dari bantuan Dinas Kooperasi.

b. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber dana dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama

Pemerintah Desa mengadakan pelatihan penyuluhan manajemen usaha bertujuan untuk mengatasi masalah kapabilitas inovasi Sumber Daya Manusia melalui peningkatan skill SDM melalui pelatihan manajerial laporan keuangan sehingga sudah ada pengembangan bagi keberlangsungan pengembangan kelompok UMKM dalam hal penggunaan sumber dana. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa Pemerintah Desa Masyarakat Desa khususnya para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya belum mengenal secara mendalam terkait manajerial keuangan untuk meningkatkan usahanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman

dan ilmu pengetahuan tentang menejerial pengalokasian dana. Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah memanggil mentor dibidang manajerial keuangan sehingga kelompok UMKM tersebut akan didampingi dengan ahli dibiadangnya.

5. Pembangunan dan pengembangan jejaring

a. Adanya pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya

Pemerintah Desa melakukan kerjasama dalam mengembangkan para pelaku usaha mikro di Desa membangun kemitraan dengan BUMDEs dan mini market sehingga Pemerintah Desa sudah menjalankan indikator tersebut. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa peningkatan pengembangan jejaring ini masih dalam tahap wilayah Desa. Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah diskusi dengan pengusaha-pengusaha yang sudah mapan perihal dalam strategi pemasarannya agar nantinya kelompok UMKM dapat mengembangkan produk.

b. Adanya pengembangan akses dan kesempatan dalam peningkatan keberdayaan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pemerintah Desa dalam pengembangan kelompok UMKM adalah dengan memberikan arahan kepada aparatur perangkat desa dan bekerjasama dengan perangkat daerah agar mengimpentalisir sarana prasarana akses yang ada di desa yang layak dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan indikator ini, diperoleh keterangan bahwa jika dalam persediaan sarana dan prasarana UMKM ini masih terbatas. Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan tersebut adalah Pemerintah Desa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan akses berdagang pada bazaar yang diadakan setiap hari minggu berupa stand dan lapak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan strategi pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal berdasarkan aspek-aspek strategi pemberdayaan menurut Mardikanto, 2017:170 seperti, pemerintah desa kurang turun langsung kelapangan dikarenakan kurang memiliki data yang lengkap dan akurat terkait potensi usaha yang potensial yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa, Program pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat atau pelaku usaha mikro kurang disosialisasikan secara

transparan, pemerintah desa belum mampu memberikan referensi produk sejenis yang lain di pasaran sebagai perbandingan hasil produksi usaha mikro sebagai bahan untuk meningkatkan hasil produksinya.

Selanjutnya kurangnya komunikasi dan interaksi pendekatan secara langsung oleh Pemerintah Desa, belum adanya konsep yang jelas dalam melaksanakan strategi pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro, belum secara keseluruhan dari produk usaha mikro di ikutsertakan pameran atau Bazaar karena memang diutamakan untuk produk usaha yang termasuk dalam produk unggulan dan mempunyai ciri khas kedaerahan di Desa, kurang membangun komunikasi dua arah secara intensif diantara Pemerintah Desa dan Masyarakat atau pelaku usaha mikro tersebut dimana akan menghambat dalam menyebarkan informasi, program pendampingan baru dilakukan secara umum belum mengarah secara spesifik dan khusus terhadap teknik dan pengembangan UMKM, keterbatasan alat sarana produksi serta keterbatasan pemahaman terhadap kualitas hasil produksi, kurangnya apresiasi dari pemerintahan desa terhadap para pelaku usaha mikro untuk memberikan perhatian dan pengawasan, kurang mempunyai data yang lengkap, hal ini akan mempersulit dalam melakukan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aufar, Arizali. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN di Kota Bandung*. Jurnal Pada Universitas Widyatama.
- Julianalimin. (2020). *Inilah 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Perlu Anda Tahu*. Greatday.
- Mardikanto, Toktok dan Soebianti, Poerwoko. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.